

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro, 2006).

Dalam hal ini tugas mempertinggi tingkat kesejahteraan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mampu mendorong dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat, khususnya peran sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih adil dan lebih merata akan dapat dicapai dengan baik dan lebih cepat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari adanya pembangunan ekonomi disuatu daerah, oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah dalam perekonomian seringkali terjadi di berbagai negara berkembang salah satunya Indonesia. Masalah yang sering dialami oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia antara lain kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pendidikan serta kesehatan yang masih

rendah dan lain-lain. Permasalahan tersebut juga terjadi pada daerah-daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Flores Timur. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam perekonomian di berbagai daerah Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan perekonomian yang kuat serta mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Keberhasilan pembangunan sangat diupayakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meminimalisir terjadinya permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan ketimpangan. Jika pembangunan ekonomi berhasil diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sehingga mengurangi permasalahan ekonomi. Indikator keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat melalui pendapatan perkapita akan tetapi juga melihat tingkat pertumbuhan pendapatan dalam harga konstan harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2010).

Sukirno (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menerangkan seberapa besar prestasi dari perkembangan ekonomi suatu wilayah. Menurut Jhingan (2012) terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, skala produksi, sumber daya manusia, politik, dan administrasi. Di antara faktor-faktor tersebut,

akumulasi modal dianggap sebagai faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi oleh beberapa ahli ekonomi (Jhingan, 2012).

Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari seluruh Kabupaten/Kota yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam masa tertentu adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tahun tertentu dikurangi pendapatan domestik bruto (PDRB) tahun sebelumnya dibagi pendapatan domestik bruto (PDRB) tahun sebelumnya dikali 100%. Perekonomian mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada tahun sebelumnya. Pembangunan di Kabupaten Flores Timur secara menyeluruh dan berkesinambungan dapat dikatakan telah meningkatkan perekonomian masyarakat, namun disisi lain kendala utama pemerintah dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan ditingkat daerah (Kabupaten/Kota) maupun Provinsi.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Flores Timur pada kurun waktu ini mengalami fluktuasi dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena sumber daya alam dan prasarana penunjang yang ada sangat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur.

Gambaran Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
PDRB Harga Konstan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2003-2017 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Tahun	PDRB (Rp)	Persentase (%)
1	2003	428.970.320	4.05
2	2004	430.847.240	4.68
3	2005	450.994.497	4.00
4	2006	488.599.385	4.16
5	2007	521.812.095	4.19
6	2008	549.470.454	2.92
7	2009	598.397.252	2.84
8	2010	620.969.346	5.98
9	2011	648.563.520	5.07
10	2012	720.042.350	4.69
11	2013	658.761.360	5.18
12	2014	788.610.950	4.84
13	2015	926.285.400	4.62
14	2016	1.055.023.000	4.76
15	2017	1.212.687.900	5.16

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur ,Tahun 2017

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur selama lima belas tahun terakhir dari tahun 2003 sampai 2017 mengalami fluktuasi dimana terjadi kenaikan dari tahun 2003 PDRB kabupaten flores Timur berjumlah Rp. 428.970.320, meningkat hingga tahun 2012 menjadi Rp. 720.042.350, kemudian mengalami penurunan pada 2013 menjadi Rp. 658.761.360, dan kembali meningkat hingga tahun 2017 mencapai angka Rp. 1.212.687.900. Peningkatan dan Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur mungkin disebabkan karena Kabupaten Flores Timur

berupaya mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.

Walaupun hasil pembangunan sudah menunjukkan suatu kemajuan , namun jika dilihat lebih lanjut yang sifatnya kualitatif (kualitas pertumbuhan), masih banyak persoalan yang timbul dan sampai sekarang belum dapat diselesaikan diantaranya, tingkat kemiskinan, meningkatnya pengangguran, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat serta ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau kesenjangan antar wilayah.

Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah belanja modal pemerintah, tenaga kerja dan Pendapatan Asli Daerah. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan mempertinggi intensitas ekonomi. Menurut (Halim 2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti belanja pemeliharaan dan kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 menyebutkan bahwa belanja modal pemerintah adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membagi belanja modal menjadi lima bagian yaitu:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja jalan, irigasi dan jaringan

3. Belanja gedung dan bangunan
4. Belanja peralatan dan mesin
5. Belanja aset tetap lainnya

Belanja modal berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian. Belanja jalan, jaringan, peralatan dan mesin dapat mendorong kelancaran proses usaha sektor swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, pemerintah juga mengalokasikan belanja peralatan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan serta pendidikan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003). Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan set tetap lainnya. Pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif ditunjukkan dengan alokasi belanja pegawai yang terus meningkat dibandingkan dengan alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah yang justru terus menurun. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan belanja modal untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas dan pembelanjaan lain yang tidak tepat sasaran. Seharusnya belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatannya, hal ini akan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam mempercepat pembangunan di daerah disegala bidang agar terlaksananya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, pemerintah memerlukan modal besar akan tetapi kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal untuk mempercepat pembangunan sangatlah terbatas.

Proporsi maupun perkembangan realisasi belanja publik yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja aparatur daerah juga

menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif. Keadaan ini menyebabkan realisasi belanja daerah yang besar belum mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Flores Timur secara signifikan. Belanja modal di Kabupaten Flores Timur dapat digambarkan pada Tabel 1.2. sebagai berikut :

Tabel 1.2
Belanja Modal di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2003-2017

No	Tahun	Belanja modal (Rp)	Presentase (%)
1	2003	700.510.230.00	12.00
2	2004	740.823.650.00	10.38
3	2005	29.976.037.711.00	66.29
4	2006	1.758.427.775.00	75.99
5	2007	98.018.995.528.00	71.02
6	2008	85.230.550.239.00	79.42
7	2009	109.253.467.470.00	82.00
8	2010	98.756.440.135.00	76.56
9	2011	96.550.619.115.00	57.33
10	2012	94.880.835.410.96	50.39
11	2013	89.970.361.601.00	52.28
12	2014	88.192.733.204,00	28.92
13	2015	116.876.776.935,00	32.52
14	2016	173.657.188.305,00	48.58
15	2017	127.794.983.283,00	24.87

Sumber : BKD Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019

Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa belanja modal Kabupaten Flores Timur mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2003 Belanja Modal Kabupaten Flores Timur berjumlah Rp. 700.510.230.00, mengalami peningkatan hingga tahun 2005 mencapai Rp. 29.976.037.711.00, kemudian mengalami penurunan

yang signifikan pada tahun 2006 menjadi Rp. 1.758.427.775.00, dan kembali meningkat pada tahun berikutnya menjadi Rp. 98.018.995.528.00, dan kembali menurun pada 2008 belanja modal sebesar Rp. 85.230.550.239.00, kemudian meningkat menjadi Rp. 109.253.467.470.00, pada tahun 2009. Kemudian Belanja Modal Kabupaten Flores Timur mengalami Penurunan Hingga Pada tahun 2014 menjadi Rp. 88.192.733.204,00, dan kembali meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi Rp. 173.657.188.305,00 kemudian menurun kembali pada tahun 2017 menjadi Rp. 127.794.983.283,00 .

Menurut (Todaro 2004) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan terkonsentrasinya jumlah penduduk di perkotaan sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi. Jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki skill akan akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi/output disuatu daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun indonesia tidak mengandung batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki jaminan sosial nasional yang cukup kuat. Kesimpulannya

bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang ikut serta dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu 15-65 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002).

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut (Suparmoko, 2002) angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan golongan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985).

Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Data tenaga kerja di Flores Timur dapat dilihat pada Tabel 1.3. sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Tenaga kerja di Kabupaten Flores Timur Tahun 2003-2017
(Jiwa)

No	Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	Persentase(%)
1	2003	100.920	63,98
2	2004	104.563	69.56
3	2005	111.958	73.14
4	2006	93.498	75.13
5	2007	106.740	76.00
6	2008	107.195	70.40
7	2009	108.292	69.37
8	2010	100.539	69.73
9	2011	105.888	73.34
10	2012	110.924	75.27
11	2013	113.192	73.65
12	2014	111.195	70.17
13	2015	150.386	74.62
14	2016	156.332	74.62
15	2017	103.368	75.62

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 (Data diolah)

Tabel 1.3 menggambarkan tenaga kerja di Kabupaten Flores Timur dari tahun 2003-2017. Dimana pada lima belas tahun terakhir jumlah Tenaga kerja Kabupaten Flores Timur mengalami Fluktuasi. Pada Tahun 2003 Tenaga kerja Kabupaten Flores Timur berjumlah 100.920, mengalami peningkatan hingga tahun 2005 mencapai angka 111.958, kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 93.498, dan meningkat kembali hingga tahun 2009 menjadi 108.292, dan menurun pada tahun 2010 menjadi 100.539 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah Tenaga kerja kabupaten flores timur meningkat hingga tahun 2013 menjadi 113.192 jiwa dan kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 111.195, kemudian meningkat kembali hingga tahun 2016

menjadi 156.332, dan menurun pada tahun 2017 menjadi 103.368 jiwa .

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 dengan Tenaga kerja terendah yaitu berjumlah 93.498 jiwa, kemudian pada tahun 2016 menjadi tahun dengan Tenaga kerja tertinggi yaitu berjumlah 156,332 jiwa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka, penulis merasa perlu melakukan penenitian lebih lanjut dengan mengangkat judul : “Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Flores Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah Belanja modal dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Flores Timur?
2. Apakah belanja modal dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui belanja modal, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui belanja modal, dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, terkait dengan PDRB di Kabupaten Flores Timur.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun program peningkatan PDRB.